

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh 21 KARYAWAN  
SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PAJAK PERUSAHAAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH RI No.5 DAN  
PERATURAN PEMERINTAH RI No.47 TAHUN 2003  
(KASUS PADA PT. "X" DI SURABAYA)**

IKK  
A. 394/04  
cal  
p.

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**

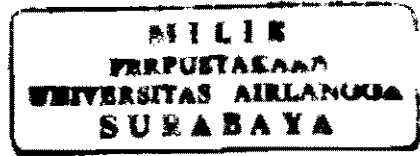


**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**DIAJUKAN OLEH**

**AGUNG ADI CAHYONO  
No. Pokok : 049715605**


**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



Surabaya,.....<sup>24-8-2004</sup>.....

**Skripsi telah selesai dan siap diuji**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Drs. H. Heru Tjaraka". The signature is stylized with a large initial "D" and a long horizontal stroke.

**Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si, Ak**

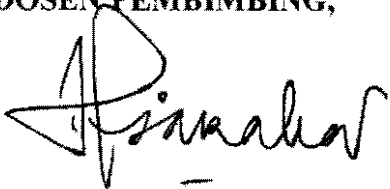
**SKRIPSI**

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh 21 KARYAWAN  
SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PAJAK PERUSAHAAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH RI No.5 DAN  
PERATURAN PEMERINTAH RI No.47 TAHUN 2003  
( KASUS PADA PT. "X" DI SURABAYA )**

**DIAJUKAN OLEH :**  
**AGUNG ADI CAHYONO**  
**No. Pokok : 049715605**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

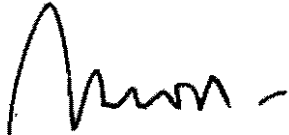
**DOSEN PEMBIMBING,**



**Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si, Ak**  
**NIP. 132 054 304**

**TANGGAL** 10-9-2004

**KETUA PROGRAM STUDI,**



**Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak**  
**NIP. 131 287 542**

**TANGGAL** 31-8-04

## ABSTRAK

Upaya minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih di dalam lingkup peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini memfokuskan pada Undang-undang yang terkait dengan upaya minimalisasi Pajak Penghasilan, yaitu Undang-undang No. 17 khususnya pada Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan atas Karyawan beserta peraturan pelaksanaannya.

Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak. Tujuannya adalah pajak yang terhutang berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Secara garis besar penelitian ini memfokuskan pada upaya perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 Karyawan pada PT."X" Surabaya dalam kaitannya dengan munculnya 2 Peraturan Pemerintah pada tahun 2003 yang mengatur mengenai jumlah pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah, adapun peraturannya yaitu : Peraturan Pemerintah RI No. 5 dan Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2003.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT."X" selain mengacu pada kedua peraturan tersebut juga didasarkan pada kondisi PT."X" yang mengalami kinerja kurang baik. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dari perencanaan pajak pada PT."X" adalah untuk mencapai pengeluaran yang minimal atas PPh 21 Karyawan tanpa memperhatikan dampak dari pengenaan pajak Badan, berbeda dengan perencanaan pajak pada umumnya yang berusaha memaksimalkan pengeluaran pajak atas PPh 21 sebagai biaya fiskal sehingga tercapai pajak Badan yang minimal.

Karena PT."X" menanggung seluruh PPh 21 Karyawan yang terhutang, hanya dua alternatif perencanaan pajak atas PPh 21 Karyawan yang bisa dilakukan yaitu dengan metode Tunjangan Pajak dan metode *Gross-Up*. Dari hasil analisa dua alternatif tersebut dapat diambil simpulan bahwa pada PT."X" Surabaya setelah dilakukan penyesuaian atas dua peraturan pemerintah diatas, penghitungan PPh 21 dengan metode Tunjangan ternyata dapat menghemat pajak lebih besar Rp.618.372.337,00 dibandingkan metode *Gross-Up* sebesar Rp. 614.495.074,00.

**Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh 21 Karyawan, Peraturan Pemerintah RI No.5 dan Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2003, Metode Tunjangan dan Metode *Gross-Up*.**